

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Duswara, Dudu, Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Fauzan, Encik, Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Harimurti Yudi Widagdo. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2021.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hadjon, M, Philipus. *Butir-Butir Pokok Mengenai Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986*. Bogor: 2000.
- Hadjon, M, Philipus, *Efektivitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. 2004.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975.
- Laritmas, Selfianus, Rosidi, Ahmad. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Marbun, S.F. *Pengadilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Mertodikusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Leberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, 102.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rosyada, Dede. *Pendidikan kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Wiyono. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Saldana, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Amerika: SAGE Publication, 2014.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soemantri, Bambang, Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2011.
- Soemaryono, and Anna Erliyana. *Tuntunan Praktek Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Pramedya Pustaka, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengaruh Penelitian Hukum*. Jakarta: 1986.
- Soetami, A, Siti. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.
- Syahza, Almasdi. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: 2021.
- Tjkranegara, Soegijatno. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2002.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

B. Jurnal & Skripsi

- Ardianto, Sema. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah." *Khaira Ummah* 17:1, Maret 2022.

- Habibah, Nurul. "Tinjauan Yuridis Putusan PTUN nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tentang KTUN Berantai Yang Menjadi Obyek Sengketa TUN (Studi Kasus Terhadap Keputusan BPD Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2014.
- Hulu, K. I., Telaumbanua, D., dan Laia, F. "Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara", *Panah Keadilan* 3:2, Agustus 2024.
- Jabaruddin. "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara", *Lakidende Law Review* 1:1, April 2022.
- Jeddawi, M. dan Bakri, R., "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Pallangga Praja* 4:2, Oktober 2022)
- Kalim, Akbar, Muhammad. "Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik" *Dharmasisya* 1:1, Maret 2021.
- Mayaningsih, Afifah. "Akibat Hukum Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY", *Hukum Tata Negara* 1:2, 2022.
- Nur, Zulfahmi. "Rekonstruksi negara hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia." *Kajian Islam dan Masyarakat* 6:1, 2024.
- Rangkuti, Afifa. "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat." *Ilmiah Penegakan Hukum* 5:2, Desember 2018.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance* 2:3, 2019.
- Takririiah, Etik. "penyelesaian sengketa pilkades tahun 2015 dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (Studi kasus di Desa Pejaten, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Yuningsih, Neneng Yani, dan Valina Singka Subekti. "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013)." *Jurnal Politik*, 2016.

C. Internet

TUN, Pengadilan Bandung, "Profil Pengadilan." *Web. PTUN Bandung*.
<https://www.ptun-bandung.go.id/>. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Badan-Badan Pengadilan Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman, Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Jaminan Kedudukan Dan Perlakuan Yang Sama Bagi Setiap Orang Dalam Hukum Dan Dalam Mencari Keadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.
- SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon atas nama Rofi'i.
- Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: W2.TUN2/140/HK.06/II/2023.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/G/2020/PTUN.BDG tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT tentang putusan Tingkat Banding pada Sengketa Pemilihan Kepala Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 215/K/TUN/2021 tentang putusan Tingkat Kasasi Sengketa Pemilihan Kepala Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.